

Judul : RUU TPKS Rawan Tersendat di Komisi
Tanggal : Jumat, 14 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

RUU TPKS Rawan Tersendat di Komisi

DPR disarankan membentuk panitia khusus untuk membahas agar para legislator yang terlibat ialah yang benar-benar memahami substansinya.

ANGGI TONDI MARTAON
redaksi@mediaindonesia.com

KOMISI Nasional (Komnas) Perempuan berharap Badan Musyawarah (Bamus) DPR memilih alat kelengkapan dewan (AKD) yang tepat untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dengan begitu, bakal beleid tersebut bisa segera disahkan menjadi undang-undang (UU).

"Kami berharap, justru sudah lebih cepat, apalagi namanya sudah percepatan," kata

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani di Jakarta, kemarin.

Andy mengaku tidak ingin pembahasan dilakukan di komisi karena khawatir proses pembahasan bakal lambat. "Tingkatan (pembahasan) lebih panjang lagi," ungkap dia.

Setidaknya ada dua pilihan AKD yang dinilai bisa mempercepat pembahasan RUU TPKS, yakni Badan Legislasi (Baleg) DPR atau panitia khusus (pansus).

Penyusunan dan pembahasan draf RUU TPKS di Baleg telah berlangsung setahun belakangan. Draft RUU itu akan diajukan ke Rapat Paripurna DPR untuk men-

dapatkan persetujuan sebagai RUU inisiatif DPR pada Selasa (18/1). Selanjutnya, bila disetujui, RUU itu akan dibahas DPR bersama pemerintah.

Presiden Jokowi turut mendesak pengesahan segera beleid yang ditujukan untuk memperkuat tindak pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia tersebut. DPR pun menjanjikan percepatan pembahasan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyarankan pembentukan panitia khusus DPR untuk membahas RUU TPKS. Hal itu bertujuan bakal beleid itu dibahas legislator-legislator yang memahami substansinya dengan baik.

"Tidak hanya cukup di Baleg. Partisipasi publik juga perlu untuk diperhatikan, bukan hanya basa-basi," imbuh Lucius

dalam forum diskusi bertajuk Ke Mana RUU TPKS: Urgensi vs Resistensi?, kemarin.

Kurniasih Mufidayati, anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, fraksi yang selama ini menolak RUU TPKS, menyatakan keputusan selanjutnya ada di pimpinan DPR. Kendati begitu, fraksinya menekankan satu hal.

"Yang perlu kita utamakan adalah pentingnya untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan seksual jika dibandingkan dengan mengobati," ujar Kurniasih.

Tidak emosional

Ketika menerima aspirasi dari sejumlah aktivis perempuan terkait dengan RUU TPKS, Rabu (12/1), Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan beleid itu memerlukan kehati-hatian dan kecermatan dalam pembahasan. Untuk mengantisipasi proses

yang panjang, ia mengharapkan publik turut mengawal.

"Kalaupun ada liku-liku dan dinamika di lapangan, kita harus tetap semangat. Tidak boleh emosional dan jangan menyerah," terangnya.

Puan menekankan RUU TPKS harus hadir sebagai satu payung hukum untuk menjaga serta membuat aman masyarakat, bukan hanya kaum perempuan.

"Karena ada juga laki-laki korban kekerasan seksual. Jadi, harapannya adalah RUU TPKS ini nantinya dapat melindungi, memberikan rasa aman, nyaman tidak hanya buat perempuan dan anak, tapi juga seluruh warga Indonesia," tandas Puan.

DPR disebut Puan akan senantiasa terbuka terhadap masukan masyarakat, termasuk dalam pembahasan RUU TPKS. (Mef/Sru/P-2)